

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

UMKM merupakan unit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Menurut UU No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, UMKM diartikan sebagai bisnis yang dijalankan oleh individu, rumah tangga atau badan usaha yang berskala produksi kecil. Usaha mikro, kecil, dan menengah ini digolongkan berdasarkan omzet tahunan, jumlah kekayaan usaha atau aset serta jumlah karyawan yang bekerja pada unit usaha tersebut. Usaha mikro, kecil, dan menengah dibagi menjadi tiga jenis yakni usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang merupakan pilar penting pembangunan ekonomi Indonesia terus didorong agar dapat naik kelas, sehingga bisa memberikan kontribusi lebih besar bagi perekonomian, dan menyerap tenaga kerja lebih banyak. Sektor UMKM memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 61%, atau senilai dengan Rp9.580 triliun, bahkan kontribusi UMKM terhadap penyerapan tenaga kerja mencapai sebesar 97% dari total tenaga kerja. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, Indonesia memiliki 65,5 juta UMKM yang jumlahnya mencapai 99% dari keseluruhan unit usaha.

Perkembangan pesat UMKM nyatanya juga berdampak pada pelaku UMKM yang siap bersaing dengan pelaku UMKM lainnya (Wardhana, 2022). Kinerja usaha merupakan penentuan melalui ukuran tertentu yang mana dapat

digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu usaha dalam menghasilkan keuntungan (Kusumadewi, 2017). Optimalisasi kinerja Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sangat dipengaruhi oleh aktivitas permodalan, terutama dalam hal penggunaan kredit. Kredit UMKM memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan dan pengembangan usaha mikro. Kinerja keuangan juga didefinisikan sebagai analisis yang digunakan dalam mengevaluasi sampai sejauh mana seseorang atau suatu lembaga/perusahaan sudah menjalankan aktivitasnya berdasar pada aturan-aturan mengenai pelaksanaan keuangan (Fahmi, 2012). *Non-Performing Loan* merupakan indikator yang mengukur tingkat kredit bermasalah di sektor perbankan, sedangkan kinerja UMKM mencerminkan keadaan sektor riil ekonomi. Penurunan kinerja keuangan menyebabkan UMKM mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya sehingga menyebabkan peningkatan *Non-Performing Loan* (NPL) atau dengan kata lain, kinerja keuangan yang rendah menyebabkan NPL kredit tinggi (Naomi & Sinarwati, 2023). Berikut merupakan data persentase *Non-Performing Loan* yang ada di Provinsi Bali pada Tahun 2023 Triwulan I.



(Sumber: Bank Indonesia, 2023)

**Gambar 1. *Non-Performing Loan* (NPL) Kredit UMKM Provinsi Bali
Triwulan I Tahun 2023**

Gambar 1 menunjukkan tingkat *Non-Performing Loan* dari 8 Kabupaten dan 1 Ibu Kota di Bali. Posisi pertama diduduki oleh Kabupaten Klungkung (4,33%), Kabupaten Karangasem (4,12%), Kabupaten Buleleng (3,73%), Kota Denpasar (3,25%), Kabupaten Jembrana (2,16%), Kabupaten Tabanan (1,89%), Kabupaten Bangli (1,67%), Kabupaten Badung (1,58%), dan posisi terakhir diduki oleh Kabupaten Gianyar (0,69%). Semakin tinggi nilai NPL Kredit UMKM menunjukkan semakin banyak UMKM yang tidak membayar pokok dan pinjaman kreditnya sebagaimana yang telah dipersyaratkan dalam perjanjian kredit. Kabupaten Karangasem sendiri menduduki posisi NPL kedua tertinggi yang ada di Bali. Hal ini artinya banyak UMKM yang ada di daerah Kabupaten Karangasem yang belum dapat memenuhi kebutuhan keuangannya. Pengelolaan dana KUR yang dilakukan oleh UMKM masih kurang efektif karena banyak pelaku UMKM memiliki pandangan mengenai hasil dari usaha akan dipergunakan dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari, maka dari itu banyak terjadi modal untuk usaha dipergunakan dalam pemenuhan kebutuhan pribadi, sehingga dalam mengelola dan menggunakan dana KUR dengan tepat sasaran merupakan aspek yang terpenting guna meningkatkan kinerja keuangan UMKM (Haryati, 2019).

Bali merupakan wilayah di Indonesia yang pariwisatanya telah dikenal oleh kalangan masyarakat di seluruh dunia. Selain pariwisata, kentalnya adat istiadat serta besarnya potensi alam yang dimiliki pulau Bali menjadikan masyarakat Bali melakukan pemenuhan kebutuhan hidupnya dengan mendirikan UMKM.

Berdasarkan data keragaan UMKM Bali Tahun 2023 jumlah UMKM di Bali adalah sebagai Berikut.

Tabel 1.1 Jumlah UMKM di Provinsi Bali

Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM		
	2021	2022	2023
Kab. Bangli	44.123	44.175	44.251
Kab. Buleleng	54.489	57.216	66.368
Kab. Gianyar	75.542	75.620	75.666
Kab. Jembrana	46.277	66.537	67.183
Kab. Karangasem	57.456	50.717	50.717
Kab. Klungkung	35.792	36.072	35.792
Kab. Tabanan	43.715	47.160	47.957
Kab. Badung	22.647	40.989	21.699
Kota Denpasar	32.224	32.226	29.749

(Sumber: Data Keragaan Provinsi Bali, 2023)

Tabel 1 menunjukkan pertumbuhan jumlah UMKM yang ada di Provinsi Bali dalam 3 tahun terakhir yaitu dari tahun 2021 hingga tahun 2023. Dilihat dari data tersebut penyebaran UMKM yang ada di Bali tidak merata. Hampir seluruh Kabupaten dan Kota yang ada di Bali mengalami peningkatan pertumbuhan UMKM, kecuali 2 Kabupaten dan 1 Kota yaitu Kabupaten Badung, Kabupaten Karangasem, dan Kota Denpasar. Kabupaten Karangasem menjadi salah satu UMKM yang berada pada urutan No. 2 dengan jumlah penurunan jumlah UMKM setelah Kabupaten Badung. Pada tahun 2021 Jumlah UMKM di Kabupaten Karangasem menyentuh jumlah 57.456 UMKM turun menjadi 50.717 UMKM yang masih tersisa. Hal ini menjadi suatu fenomena dimana adanya penurunan yang cukup signifikan dari UMKM di Kabupaten Karangasem. Hal ini menunjukkan bahwasannya kinerja keuangan yang tidak baik. Kredit usaha yang tidak terkendali menyebabkan masalah finansial yang menunjukkan kinerja keuangan yang kurang baik sehingga menyebabkan kebangkrutan dalam usaha.

Jumlah UMKM di Kabupaten Karangasem berada pada posisi ke-5 dibawah Kabupaten Bangli, Buleleng, Gianyar, dan Jembrana dengan jumlah 50.717 UMKM. Namun, tingkat *Non-Performing Loan* Kabupaten Karangasem berada posisi kedua dengan persentase 4,12%. Sehingga hal ini menunjukkan Jumlah UMKM di Kabupaten Karangasem bukanlah Kabupaten dengan Jumlah UMKM terbanyak namun banyak UMKM yang tingkat kredit macet UMKM yang ada di Kabupaten Karangasem menjadi kedua tertinggi di Bali. Hal ini menandakan bahwasannya kinerja keuangan UMKM yang ada di Kabupaten Karangasem menunjukkan berada dalam keadaan yang kurang baik. Berikut merupakan data UMKM di Kabupaten Karangasem.

Tabel 1.2 Data Jumlah UMKM di Kabupaten Karangasem

No	Kecamatan	Data Perkecamatan
1	Karangasem	10987
2	Abang	6148
3	Bebandem	8208
4	Selat	6339
5	Kubu	8216
6	Manggis	4555
7	Sidemen	3449
8	Rendang	2815
Jumlah		50.717

Sumber: Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Karangasem

Kinerja dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan dijelaskan oleh salah satu teori yakni *Resource-Based Theory*. *Resource-Based Theory* digagas pertama kali oleh Wernerfelt (1984) yang menguraikan sebuah bisnis akan semakin unggul dalam persaingan usaha dan mendapatkan kinerja keuangan yang baik dengan cara memiliki, menguasai, dan memanfaatkan sumber daya atau aset-aset strategis yang penting (aset berwujud dan tidak berwujud) (Yasrawan et al., 2023). Teori ini menyatakan bahwa sumber

daya yang baik pada perusahaan akan berdampak terhadap kinerja jangka panjang perusahaan serta akan menjadikan perusahaan lebih unggul bersaing dengan para kompetitor. Sumber daya adalah semua yang dimiliki dan dikendalikan perusahaan baik itu aset, kemampuan perorangan karyawan, pengetahuan tentang teknologi, proses organisasional, dan informasi yang berguna untuk mengimplementasikan strategi perusahaan sehingga meningkatkan efisiensi dan efektifitas perusahaan (Pasha dkk, 2017). Sumber daya perusahaan atau bisnis dikelompokkan menjadi tiga kategori yakni sumber daya modal fisik (teknologi yang digunakan oleh perusahaan, pabrik, peralatan, lokasi bisnis dan akses ke bahan baku), sumber daya modal manusia (pengalaman, kemampuan, dan kecerdasan manusia ada di dalam perusahaan), dan sumber daya modal organisasi (struktur pelaporan, perencanaan, pengawasan baik di dalam maupun dalam hubungannya dengan lingkungan di luar perusahaan) (Barney, 1991). Sehingga sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan termasuk UMKM yaitu adalah literasi keuangan dan pengelolaan keuangan sebagai sumber daya yang merupakan bagian dari sumber daya modal manusia, serta inklusi keuangan sebagai sumber modal fisik.

Literasi keuangan menjadi salah satu sumber daya modal manusia yang dapat mempengaruhi kesuksesan UMKM. Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan literasi keuangan sebagai suatu keyakinan, pengetahuan, dan keterampilan yang mempengaruhi sikap dan perilaku manusia dalam mengambil sebuah keputusan dalam pengelolaan keuangan sehingga dapat mencapai kesejahteraan (OJK, 2016). Literasi keuangan adalah pemahaman seseorang terhadap pengelolaan keuangan yang efektif sebagai pengambilan keputusan keuangan agar mempengaruhi usaha yang berguna untuk meningkatkan kesejahteraan (Daud et al., 2023). Literasi

keuangan yang baik dapat mendukung peningkatan kinerja keuangan UMKM (Hilmawati & Kusumaningtias, 2021). Pada UMKM, literasi keuangan ini memberikan peningkatan kemampuan dalam pengelolaan keuangan serta akses yang membuatnya untuk lebih berkembang (Wardhana, 2022). Literasi keuangan dapat meningkatkan pemahaman pemilik usaha mikro tentang manajemen keuangan. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang konsep seperti pengelolaan kas, pengendalian biaya, dan perencanaan keuangan, pemilik usaha mikro dapat membuat keputusan keuangan yang lebih cerdas dan efisien. Ini dapat mengarah pada pengelolaan modal yang lebih baik, mengoptimalkan sumber daya yang tersedia, dan meningkatkan profitabilitas. Menurut survey Bank Indonesia terbaru pada *MSME Empowerment Report 2022* sebanyak 69,5% UMKM belum menerima pinjaman. Tantangan ini bersumber dari rendahnya literasi keuangan peminjam atau UMKM. Menurut survei yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2022, indeks literasi keuangan penduduk Indonesia mencapai 49,68 persen. Angka ini menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yaitu 21,84 persen pada 2013, 29,70 persen pada 2016, dan 38,03 persen pada 2019. Meskipun ada peningkatan signifikan, tingkat literasi keuangan masih belum mencapai 50 persen atau setengah dari target yang diharapkan (OJK, 2022). Leyshon (1998) mengungkapkan bahwa dengan dimilikinya literasi keuangan berarti dapat melakukan pengelolaan keuangan dan pengawasan yang lebih baik. Namun sebaliknya, apabila tingkat literasi keuangan seorang individu rendah, maka akan berpengaruh terhadap perilaku yang tidak rasional dalam menanggapi hal-hal yang berkaitan dengan keuangan (Mandell, 2011).

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilaksanakan oleh Wulandari (2019), Suardana (2020), Hilmawati & Kusumaningtias, dan Candraningsih dkk (2023) menyatakan bahwasannya menunjukkan literasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan UMKM. Sedangkan penelitian Pradipta (2022) menunjukkan literasi keuangan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Sehingga masih adanya inkonsistensi hasil penelitian terdahulu terkait pengaruh literasi keuangan terhadap kinerja keuangan UMKM sehingga masih sangat diperlukan.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi kinerja keuangan UMKM adalah pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan juga merupakan salah satu sumber daya modal manusia. Pengelolaan keuangan salah satu faktor yang perlu diperhatikan sebab bisa menjadi penentuan berhasil atau tidaknya suatu kinerja usaha yang dilakukan. Pengelolaan keuangan yang tidak cermat atau kurang baik dapat menyebabkan pelaku usaha tidak dapat melakukan tindakan preventif dan pencegahan terhadap penyimpangan yang mungkin terjadi dalam kegiatan usahanya (Hertadiani & Lestari, 2021). Pengelolaan keuangan yang baik sangat penting bagi kinerja keuangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM seringkali memiliki keterbatasan dalam sumber daya finansial, sehingga pengelolaan keuangan yang efektif dapat menjadi kunci keberhasilan mereka. Rendahnya perhatian pengusaha UMKM terhadap pentingnya pengelolaan keuangan dapat menyebabkan hal tersebut menjadi masalah bagi keberlanjutan UMKM itu sendiri. Pengelolaan keuangan yang efektif dapat menjadi kunci keberhasilan bagi usaha mikro dalam berbagai aspek. Dengan melakukan perencanaan keuangan yang matang, pemilik usaha mikro dapat mengalokasikan

sumber daya secara optimal untuk mendukung kegiatan operasional, investasi, dan pengembangan bisnis. Hal ini dapat menghasilkan efisiensi dalam penggunaan modal, yang pada gilirannya dapat meningkatkan profitabilitas usaha. Selain itu, pengelolaan keuangan yang baik juga mencakup pemantauan dan pengendalian pengeluaran serta pendapatan. Sehingga, semakin efektif pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemilik usaha mikro, semakin baik pula kinerja usaha mikro tersebut. Pentingnya penerapan pengelolaan keuangan UMKM sesuai dengan yang telah dijelaskan oleh Ediraras (2010), bahwa bisnis UMKM yang keuangannya dikelola dan diinformasikan secara transparan dan akurat akan memberikan dampak positif terhadap bisnis UMKM. Meskipun begitu, tak sedikit pengusaha UMKM di Indonesia yang tidak mengimplementasikan pengelolaan keuangan pada usahanya (Cahyani, 2021).

Pengelolaan keuangan yang efektif memiliki peran krusial dalam mengurangi permasalahan *Non-Performing Loans* (NPL). Dengan penilaian kredit yang akurat dan monitoring portofolio pinjaman yang berkelanjutan, bank dapat mengidentifikasi dan mengelola risiko gagal bayar dengan lebih baik. Selain itu, strategi pengumpulan utang yang efisien dan diversifikasi risiko pinjaman memastikan bahwa dampak dari pinjaman bermasalah dapat diminimalkan. Secara keseluruhan, pengelolaan keuangan yang baik membantu bank dalam menurunkan tingkat NPL dengan meningkatkan ketepatan penilaian kredit dan respons proaktif terhadap potensi masalah pembayaran. Namun, keadaan UMKM di Kabupaten Badung memiliki nilai NPL terbesar kedua di Bali, sehingga hal ini mengindikasikan terjadinya permasalahan pada pengelolaan keuangan pada UMKM di Kabupaten Karangasem.

Berdasarkan penelitian Habibi dkk (2022) menyatakan variabel pengelolaan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM. Hal ini juga sejalan dengan penelitian Romain & Mardani (2021) pengelolaan keuangan berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ardiyani dkk (2021) pengelolaan keuangan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja UKM. Menurut Khadijah & Purba (2020) pengelolaan keuangan mencakup beberapa indikator antara lain perencanaan keuangan, pencatatan, pelaporan, pengendalian.

Faktor lainnya yang mempengaruhi kinerja keuangan UMKM adalah inklusi keuangan. Faktor ini merupakan salah satu sumber daya modal fisik. Melalui peraturan yang diterbitkan oleh OJK No. 76/POJK.07/2016 tahun 2016, inklusi keuangan adalah ketersediaan akses akan berbagai lembaga, produk, dan layanan jasa keuangan formal sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan akses ini juga didukung dengan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai sistem, produk, dan jasa keuangan, serta ketersediaan layanan keuangan formal. Adapun akses akan produk, sistem, dan jasa keuangan sesuai kebutuhan masyarakat perlu menimbang beberapa faktor: biaya terjangkau, efektifitas dan efisiensi, serta berkualitas. Adapun keterkaitan inklusi keuangan dengan kinerja usaha mikro adalah inklusi keuangan, yang mencakup akses yang lebih luas terhadap layanan keuangan seperti tabungan, kredit, dan asuransi, diyakini memiliki dampak positif terhadap kinerja usaha mikro. Pertama, akses yang lebih baik terhadap layanan keuangan dapat membantu pemilik usaha mikro dalam mengelola likuiditas mereka dengan lebih baik. Dengan memiliki akses yang mudah ke rekening bank dan

layanan perbankan lainnya, mereka dapat memperkuat kontrol atas aliran kas mereka, memungkinkan untuk pembayaran tepat waktu kepada pemasok dan karyawan, serta mengurangi risiko ketidakstabilan keuangan. Penelitian Khera et al. (2021) terhadap negara berkembang yang menemukan bahwa inklusi keuangan digital didukung oleh akses infrastruktur, literasi keuangan dan digital, serta kualitas institusi dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi negara. Inklusi keuangan dikatakan lahir untuk mengurangi hambatan yang dialami pelaku UMKM dalam mengakses layanan keuangan. Inklusi keuangan berperan dalam meminimalisir hambatan terkait akses dan penggunaan layanan pada jasa keuangan dengan didukung oleh infrastruktur yang tersedia (Yanti, 2019). Berbagai produk layanan jasa keuangan yang tersedia dapat mempermudah masyarakat tidak terkecuali pelaku UMKM dengan memutuskan produk mana yang akan digunakan menyesuaikan dengan keperluan usahanya (Lumenta & Worang, 2019). Dilansir dari Survey Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) menyatakan bahwasannya saat ini indeks literasi dan inklusi keuangan masyarakat di Bali berada di atas SNLIK tingkat nasional. Literasi keuangan Bali 57.66% dan Literasi Inklusi 92.21% (SNLIK, 2022). Indeks inklusi keuangan berada di atas rata-rata, namun Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra menilai inklusi keuangan di Bali masih belum optimal. Hal ini dikarenakan layanan website kredit usaha rakyat yakni kurbali.com belum banyak dijangkau atau diakses oleh keseluruhan masyarakat, termasuk pelaku UMKM yang ada di Provinsi Bali. Jadi meski serapan KUR di Bali sudah baik namun belum dinilai optimal (Wiratmini, 2020). Permasalahan Non-Performing Loans (NPL) yang tinggi dapat menjadi hambatan serius bagi upaya inklusi keuangan. Ketika tingkat NPL meningkat, bank menjadi

lebih berhati-hati dalam memberikan pinjaman karena risiko gagal bayar yang tinggi. Hal ini dapat mengakibatkan pengetatan standar kredit dan penurunan jumlah pinjaman yang disetujui, yang pada akhirnya menghambat akses masyarakat ke layanan keuangan, khususnya bagi mereka yang termasuk dalam segmen yang belum terlayani secara memadai. Dengan kata lain, NPL yang tinggi dapat mengurangi keberanian bank untuk memberikan pinjaman kepada kelompok yang kurang beruntung atau baru pertama kali mengakses layanan keuangan, sehingga memperlambat laju inklusi keuangan.

Berdasarkan hasil penelitian Lumenta & Worang (2019) menyatakan bahwasannya pelaku UMKM sangat familiar dengan program inklusi keuangan dan dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha dengan efektif. Hidayatulloh (2020), Maharani & Cipta (2022), Wardhana (2022) menyatakan bahwasannya inklusi keuangan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan UMKM. Namun dalam penelitian Jumady dkk (2022) menyatakan inklusi keuangan berpengaruh negative terhadap kinerja usaha. Penelitian yang dilakukan oleh Hilmawati & Kusumaningtias (2021) menunjukkan bahwa inklusi keuangan tidak berpengaruh terhadap kinerja dan keberlangsungan sektor UMKM. Pelaku UMKM masih banyak mengalami kendala untuk mengembangkan dan mempertahankan usahanya daikibatkan oleh faktor permodalan yang terbatas (Akhiar, 2021). Hambatan ini muncul karena sulitnya dalam mengakses lembaga keuangan dimana sulitnya pelaku UMKM untuk memenuhi persyaratan dari Bank dan Lembaga Keuangan dan juga karena kesenjangan kemiskinan, tingginya suku 10 bunga kredit mikro, kurangnya kemampuan manajemen pelaku UMKM, dan terbatasnya saluran

distribusi jasa keuangan, hal inilah yang menyebabkan inklusi keuangan penting untuk diterapkan (Nengsih, 2015).

Berdasarkan fenomena dan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya dan inkonsistensi penelitian terdahulu, peneliti memutuskan untuk uraian penelitian dengan mengangkat judul **“Pengaruh Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan, Dan Pengelolaan Keuangan Terhadap Kinerja UMKM Di Kabupaten Karangasem”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat mengidentifikasi beberapa permasalahan yaitu sebagai berikut.

1. Jumlah UMKM di Kabupaten Karangasem berada pada posisi ke-5 dibawah Kabupaten Bangli, Buleleng, Gianyar, dan Jembrana dengan jumlah 50.717 UMKM. Namun, tingkat *Non-Performing Loan* Kabupaten Karangasem berada posisi kedua dengan persentase 4,12%.
2. Menurut survey Bank Indonesia terbaru pada MSME Empowerment Report 2022 sebanyak 69,5% UMKM belum menerima pinjaman. Tantangan ini bersumber dari rendahnya literasi keuangan peminjam atau UMKM. Menurut survei yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2022, indeks literasi keuangan penduduk Indonesia mencapai 49,68 persen. Angka ini menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yaitu 21,84 persen pada 2013, 29,70 persen pada 2016, dan 38,03 persen pada 2019. Meskipun ada peningkatan signifikan, tingkat

literasi keuangan masih belum mencapai 50 persen atau setengah dari target yang diharapkan (OJK, 2022).

3. Indeks inklusi keuangan berada di atas rata-rata dengan nilai 92.21% namun Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra menilai inklusi keuangan di Bali masih belum optimal karena layanan website kredit usaha rakyat yakni kurbali.com belum banyak dijangkau atau diakses oleh keseluruhan masyarakat, termasuk pelaku UMKM yang ada di Provinsi Bali.
4. Rendahnya perhatian UMKM dalam melakukan pengelolaan keuangan diakibatkan UMKM seringkali memiliki keterbatasan dalam sumber daya finansial dan rendahnya pemahaman keuangan dari UMKM.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, batasan masalah dalam penelitian ini bertujuan agar permasalahan yang diteliti oleh peneliti tidak melebar sehingga dari berbagai permasalahan yang dapat mempengaruhi kinerja UMKM, peneliti hanya membatasi permasalahan-permasalahan pada variabel literasi keuangan, inklusi keuangan, dan pengelolaan keuangan terhadap kinerja UMKM.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut.

1. Bagaimana pengaruh Literasi Keuangan terhadap Kinerja UMKM di Kabupaten Karangasem?

2. Bagaimana pengaruh Inklusi Keuangan terhadap Kinerja UMKM di Kabupaten Karangasem?
3. Bagaimana pengaruh Pengelolaan Keuangan terhadap Kinerja UMKM di Kabupaten Karangasem?

1.5 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk menganalisis pengaruh Literasi Keuangan terhadap Kinerja UMKM di Kabupaten Karangasem.
2. Untuk menganalisis pengaruh Inklusi Keuangan terhadap Kinerja UMKM di Kabupaten Karangasem.
3. Untuk menganalisis pengaruh Pengelolaan Keuangan terhadap Kinerja UMKM di Kabupaten Karangasem.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Riset ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan yang mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam serta dapat dijadikan referensi berikutnya mengenai kinerja UMKM. Riset ini juga diharapkan dapat berkontribusi untuk mata kuliah Akuntansi Koperasi dan UMKM serta mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi (SIA).

1.6.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi para pelaku UMKM untuk memahami terkait literasi keuangan, inklusi keuangan, dan pengelolaan keuangan agar dapat meningkatkan kinerja keuangan dari UMKM.

